

INTERVENSI NEGARA KETIGA DAN PERAN INDONESIA BERSAMA ASEAN PADA PENYELESAIAN ISU LAUT CINA SELATAN (LCS)

Muhammad Danang Prawira Hutama

Abstract

This paper discusses the development of the issue of the South China Sea (SCS), which until now it is still unclear the direction of its resolution, and over time finally got intervention from a third country, such as the United States (US) through Freedom of Navigation Operations (FONOPS). This is certainly received strong opposition from China that the US action has violated the SCS boundary which is claimed as China's sovereign territory. Indonesia as an ASEAN member country together with other ASEAN countries that claim SCS (Philippines, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam) is also working to resolve the SCS problem which is still in the process of discussion and signing of the draft SCS Code of Conduct (CoC) with China.

Keywords: SCS, China, US, FONOPS

Pendahuluan

Laut Cina Selatan (LCS) hingga kini masih menjadi salah satu isu utama di kawasan regional dan global yang penyelesaiannya membutuhkan waktu dan upaya yang serius dari negara-negara *claimant*, dan negara-negara ketiga. Menurut media *Jakarta Greater* (2016), Tiongkok mengklaim sudah menguasai hampir seluruh wilayah LCS (sekitar 90%) dan berhasil membangun fasilitas-fasilitas militer dan bangunan lainnya di beberapa kepulauan di LCS.

Seiring dengan berjalannya waktu berbagai upaya telah dilakukan untuk penyelesaian isu ini, yaitu dengan negosiasi bilateral khususnya antara Tiongkok dengan masing-masing negara *claimant*, diskusi multilateral di antara negara-negara ASEAN (dalam bentuk AIC maupun ARF), penetapan *Code of Conduct* (CoC), pengajuan ke *Permanent Court of Arbitration* (PCA), tekanan-tekanan oleh Amerika

Serikat (AS) kepada Tiongkok melalui *Freedom of Navigation Operations* (FONOPS), maupun campur tangan oleh negara-negara ketiga. Namun demikian tidak ada satupun upaya-upaya tersebut yang berhasil menghentikan pembangunan Tiongkok di LCS, bahkan sebaliknya Tiongkok justru merasa tertantang sehingga sampai kini Tiongkok terus melakukan pembangunan di LCS yang berakibat pada meningkatnya ketegangan situasi di LCS.

Peran negara ketiga terutama AS dan persatuan ASEAN sangat diperlukan dalam penyelesaian isu LCS, namun hal tersebut hingga kini sangat sulit dilakukan karena adanya kepentingan yang mengikat dengan Tiongkok sehingga upaya penyelesaian isu LCS menjadi tidak maksimal. Seperti halnya Filipina yang justru bekerja sama dengan Tiongkok melakukan eksplorasi di LCS, walaupun mengalami hubungan yang pasang-surut (Batongbacal, 2018).

Semakin lama isu ini berlangsung maka posisi Tiongkok akan semakin kuat atas klaim LCS, sehingga berpotensi merebut lebih jauh kedaulatan negara-negara *claimant* lainnya dan bahkan menutup kebebasan bernavigasi dan akses melintasi LCS. Selama ancaman eksternal masih ada, maka Tiongkok akan terus melanjutkan pembangunannya di LCS. Terkait strategi kebebasan bernavigasi, AS telah mengerahkan segala daya upayanya untuk mendukung kebijakannya di LCS dan mengerahkan kekuatan militernya untuk menandingi agresivitas Tiongkok di LCS. Sementara itu, Tiongkok juga telah mengerahkan segala daya upaya untuk melindungi wilayah LCS yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya melalui strategi "*Carrot and Stick*" dan *dual-track approach*¹ (Kemenlu Tiongkok, 2016). Hal ini telah mengakibatkan semakin meningkatnya rivalitas Tiongkok-AS terutama terkait kebebasan bernavigasi di LCS.

¹ Diusulkan oleh Brunei dan didukung oleh Tiongkok, yang pada intinya hubungan bilateral yang menguntungkan antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN *claimant* LCS.

Hasil dan Pembahasan

Pemerintah Tiongkok dan AS saling menyuarakan perang verbal terkait masalah LCS dengan tujuan membentuk opini publik yang menguntungkan bagi masing-masing pihak dalam rangka mengambil kontrol penuh bagi perkembangan di LCS (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019). Pemerintah AS melalui pejabat tinggi negara AS di antaranya Wakil Presiden AS Mike Pence, *National Security Advisor* John Bolton, *Secretary of State* Mike Pompeo telah mengkritik Pemerintah Tiongkok atas militerisasi di LCS dan menuduh bahwa Tiongkok tidak menghormati hukum internasional, serta berupaya memonopoli sumber daya maritim. Para pejabat AS tersebut juga menekankan kepada negara-negara Indo-Pasifik untuk menyuarakan penentangan terhadap pemaksaan klaim Tiongkok di LCS (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

Pemerintah Tiongkok mendesak AS untuk tidak melakukan campur tangan militer di LCS, termasuk merusak stabilitas hubungan kerja sama yang baik antara Tiongkok dan ASEAN. Tiongkok beralasan bahwa militerisasi di LCS disebabkan oleh adanya aktivitas AS di kawasan yang merugikan Tiongkok (Storey, 2012). Pemerintah Tiongkok mengungkapkan bahwa penting bagi negara Tiongkok untuk meningkatkan fasilitas pertahanan dan memperkuat keamanan di pulau-pulau buatan untuk merespon tindakan-tindakan provokatif AS (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

Aktivitas AS di LCS

Pemerintah AS memperkuat kehadiran militernya untuk menentang ekspansi Tiongkok dengan meningkatkan frekuensi aktivitas kebebasan bernavigasi (*Freedom of Navigation Operation*/FONOPS) di perairan LCS. AS telah melakukan lima misi FONOPS di LCS pada tahun 2018 lalu dengan rata-rata 2,5 bulan sekali. Sedangkan di tahun 2019, Pemerintah AS melakukan empat

misi FONOPS dari Januari hingga Agustus dengan rata-rata dua bulan sekali. Militer AS juga melakukan latihan militer bersama Inggris dan Jepang (di bulan Juni 2019) (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

Pemerintah AS meyakinkan negara-negara di kawasan dengan komitmen keamanan, dengan terus melanjutkan komitmen AS untuk menjamin keamanan regional di LCS. Upaya-upaya AS baru-baru ini adalah mengklarifikasi bahwa LCS berada di bawah perlindungan *US-Philippines Mutual Defense Treaty*. Selain itu, AS juga meningkatkan kerja sama keamanan maritim dengan negara-negara sekitar LCS dalam bentuk mengirim kapal patroli dan *drone* ke beberapa wilayah seperti Indonesia, Vietnam, dan Malaysia (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

AS telah mengerahkan beberapa kapal peranginya di perairan LCS sebagai bentuk kebebasan navigasi, yaitu:

1. Pada Januari 2019, kapal perusak USS McCampbell berlayar sejauh 22 km dari Kepulauan Paracel.
2. Pada 12 Februari 2019, kapal perang USS Spruance dan USS Preble berlayar sejauh 22 km dari Kepulauan Spratly.
3. Pada 6 Mei 2019, USS Preble dan USS Chung Hoon berlayar sejauh 12 mil laut dari Gugus Karang Gaven dan Chigua di Kepulauan Spratly (Nansha).
4. Pada 7 Agustus 2019, kapal induk bertenaga nuklir USS Ronald Reagan berlayar di sekitar wilayah perairan LCS.

Pada 4 dan 14 Maret 2019 Angkatan Udara Pasifik AS telah mengirim dua pesawat pembom B-52H Stratofortress dari Guam ke wilayah LCS dalam rangka latihan rutin. Dua operasi penerbangan tersebut merupakan bagian dari misi "*Continuous Bomber Presence*" yang dijalankan Komando Pasifik AS sejak lama. Misi tersebut bertujuan untuk menjaga kesiapan pasukan AS dan sudah sejalan

dengan hukum internasional. AS secara rutin melakukan operasi di LCS untuk mendukung sekutu demi Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka (Cronin dan Kaplan, 2012).

Pada 6-8 Mei 2019, AS melaksanakan latihan militer gabungan dengan Jepang, India, dan Filipina di perairan LCS. Latihan ini melibatkan kapal penghancur Rudal AS (USS William P Lawrence), kapal induk Jepang (Izumo), dua kapal Angkatan Laut India (kapal penghancur INS Kolkata dan kapal tanker INS Shakti), serta kapal patroli laut Filipina (VOA Indonesia, 2019). AS akan menjual 34 pesawat pengintai tanpa awak (*ScanEagle*) ke Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam yang akan digunakan untuk melakukan pengawasan intelijen terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan di kawasan LCS. Pengerjaan peralatan tersebut diperkirakan akan selesai pada Maret 2022. Dari total 34 *drone*, Malaysia akan membeli 12 unit, Indonesia dan Filipina 8 unit, dan Vietnam 6 unit (VOA Indonesia, 2019).

Negara ketiga seperti AS menyatakan akan membela Filipina jika kapal-kapal mereka dihadang atau diserang oleh Tiongkok di kawasan LCS. Hal ini merupakan bagian dari perlindungan kepada Filipina dan negara-negara *claimant* lainnya agar dapat melindungi kedaulatan, perekonomian, dan keamanan nasionalnya dari Tiongkok.

Manuver beberapa kapal Angkatan Laut AS di LCS semakin meningkat dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2019 ini seiring dengan meningkatnya jumlah misi kebebasan navigasi di LCS. Hal tersebut dapat meningkatkan ketegangan antara AS dengan Tiongkok. Namun demikian, dengan adanya klaim bahwa patroli Angkatan Laut AS di LCS hanya untuk menentang klaim maritim yang berlebihan dan menjaga akses ke perairan, sehingga kecil kemungkinan negara-negara di kawasan lainnya seperti Brunei, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Vietnam untuk menentang keberadaan kapal perang AS di wilayah perairan LCS.

Kehadiran militer AS di LCS bertujuan untuk membantu memberikan keamanan dan stabilitas yang mendorong pembicaraan diplomatik. AS berkeyakinan bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat mendominasi wilayah Indo-Pasifik. Oleh karena itu, AS bertindak tegas terhadap agresifitas Tiongkok di perairan LCS (Fravel, 2012). Sementara itu, Tiongkok menilai bahwa kebebasan bernavigasi tidak boleh digunakan untuk melanggar hak-hak negara lain. Kebebasan bernavigasi adalah konsep yang diakui secara luas oleh komunitas internasional, namun tidak boleh digunakan AS sebagai alasan untuk melanggar hak dan kepentingan negara-negara kawasan LCS yang sah (Jinlong, 2019).

Aktivitas Tiongkok di LCS

Pemerintah Tiongkok meningkatkan dan memperkuat kegiatan *deterrence* terhadap militer AS melalui serangkaian aktivitas/tindakan seperti memerintahkan militer Tiongkok atau *Peoples Liberation Army* (PLA) untuk mengikuti kapal perang AS dan memonitor aktivitas mereka di LCS. Selain itu, militer Tiongkok juga secara aktif melakukan latihan perang terkait pertahanan pulau-pulau buatan di LCS, patroli menggunakan kapal perang dan pesawat tempur termasuk menembakkan Rudal balistik DF-21D anti kapal laut ke arah perairan LCS untuk pertama kalinya (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

Pemerintah Tiongkok mengandalkan dan berpegang pada "*Dual Track Approach*" untuk menyelesaikan masalah LCS. Pemerintah Tiongkok menggunakan kesempatan sebagai penyelenggara konferensi internasional, seperti *second Belt and Road Forum for International Cooperation* untuk bertemu dengan para pemimpin dari negara-negara *claimant* LCS, dan kemudian berdiskusi dengan mereka terkait kemungkinan mengadakan kerja sama ekonomi dan kerja sama eksplorasi minyak di perairan LCS. Pemerintah Tiongkok

memanfaatkan pembacaan pertama dari *single draft negotiating text of the Code of Conduct* (CoC) pada 24 Juli 2019 untuk mengurangi peningkatan campur tangan AS di LCS dan untuk menstabilkan negara-negara kawasan di sekitar Tiongkok (Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan, 2019).

Tiongkok berhasil melakukan pembangunan yang pesat di beberapa pulau di LCS di antaranya di Kepulauan Paracel (Pulau Woody/Yongxing, Tree/Zaoshu, dan Drummond/Jinqing), *Fiery Cross*, *Mischief Reefs*, dan *Subi Reefs* yang akan dibangun kota-kota pulau. Pulau Woody menjadi patokan (*blue print*) bagi Pemerintah Tiongkok untuk membangun fasilitas-fasilitas di pulau-pulau lainnya. Tiongkok menyiagakan Rudal balistik Dong Feng (DF)-26 di perairan LCS sebagai upaya untuk menangkal ancaman AS (Heydarian, 2019).

Pada 6 Maret 2019, kapal militer Tiongkok telah menabrak kapal penangkap ikan Vietnam di Kepulauan Paracel yang mengakibatkan tenggelamnya kapal milik Vietnam. Namun Tiongkok memberikan tanggapan dengan mengatakan bahwa kapalnya berusaha menyelamatkan satu kapal Vietnam yang karam (Haryono, 2019).

Pada April 2019, Angkatan Laut Tiongkok melaksanakan latihan terbesar dalam sejarah yang ditunjukkan oleh citra satelit AS terdapat pengerahan empat jet tempur J-10 oleh Tiongkok ke pulau Woody (Aditya, 2019). *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) dan Pusat Studi Pertahanan atau *Center for Advanced Defense Studies* (C4ADS) menyatakan bahwa kapal laut Tiongkok (tiga kapal penjaga pantai yang dioperasikan oleh Badan Survei Geologi Tiongkok dan Vietnam (Haiyang Dizhi 8) melakukan aksi saling hadang di dekat area kawasan minyak lepas pantai di LCS dan di dekat ZEE Vietnam.

Xi Jinping memerintahkan dan menegaskan untuk melakukan segala cara dan upaya untuk mengamankan kepentingan, kedaulatan, dan klaim Tiongkok di LCS. Sikap Xi Jinping tersebut

dimaksudkan untuk melawan tekanan militer dan diplomatik dari AS dan sekutu-sekutu utamanya (Jepang, Australia, dan Perancis), karena telah melakukan kebebasan navigasi dan operasi penerbangan untuk menantang klaim Tiongkok di LCS.

Tiongkok sedang berupaya memblokir upaya Filipina memperbaiki fasilitas strategis di Pulau Thitu yang sedang diperebutkan oleh kedua negara, yang berpotensi terjadi bentrokan baru di LCS. Hal ini terjadi setelah Tiongkok sepakat mengeluarkan bantuan investasi miliaran dolar kepada Filipina (Heydarian, 2019).

Pemerintah Tiongkok berencana membangun 20 unit PLTN terapung di LCS khususnya di Kepulauan Paracel dan Spratly dengan dana sebesar US\$14 milyar yang akan berfungsi penuh pada tahun 2021. Selain dimanfaatkan untuk sumber energi dan penerangan, PLTN tersebut juga berfungsi untuk mempercepat eksploitasi minyak, gas alam, dan mineral mudah terbakar yang ditemukan di dasar laut (Hardoko, 2016).

Secara umum, baik Tiongkok maupun AS telah meningkatkan kekuatan dan aktivitas militernya di kawasan dan keduanya telah melakukan latihan militer skala besar, sehingga menandakan kompetisi dan rivalitas yang kuat di kawasan perairan LCS. Peningkatan rivalitas Tiongkok-AS telah mengakibatkan situasi di LCS lebih kompleks dan tidak dapat diprediksi. Berdasarkan hasil seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan (2019), dampak dari strategi rivalitas dan kompetisi Tiongkok-AS pada isu LCS adalah:

- a. Kebijakan Pemerintah AS pada isu LCS berkembang semakin tegas dan semakin banyak pendekatan militer yang digunakan AS di LCS dengan tujuan memulihkan kepercayaan negara-negara kawasan terhadap komitmen keamanan AS di kawasan.

- b. Meyakinkan dunia bahwa AS berada pada posisi yang dominan melawan dan menekan ekspansi Tiongkok di LCS.

c. Walaupun mendapat tekanan dari AS, namun Tiongkok terus mengadopsi "*Dual Track Approach*" dan strategi "*Carrot and Stick*" dalam mengatasi isu LCS dan terus meningkatkan operasi militer untuk mempertahankan klaim dan kepentingan maritim Tiongkok, serta menunjukkan rasa percaya diri Tiongkok kepada dunia dalam mengatasi isu LCS.

d. Tiongkok dan AS sama-sama melihat isu LCS sebagai *battleground* untuk kompetisi kekuatan dan kekuasaan, dan keduanya telah meningkatkan kekuatan militer untuk melindungi kepentingannya. Hal ini mengakibatkan peningkatan persaingan Tiongkok-AS. Sementara itu, negara-negara di sekitar perairan LCS juga memperkuat keamanan kedaulatannya, sehingga mengakibatkan situasi regional yang kompleks dan tidak nyaman.

Kompetisi dan rivalitas Tiongkok-AS diperkirakan akan mengakibatkan konfrontasi yang lebih besar di antara keduanya di masa depan. Adapun tiga peristiwa utama yang perlu untuk terus diikuti perkembangannya adalah:

a. Bahwa Tiongkok saat ini mendorong pelaksanaan pembacaan kedua dari *single draft negotiating text of CoC*, dengan tujuan tidak untuk demiliterisasi LCS tetapi untuk memecah belah negara-negara ASEAN dalam rangka mencegah mereka untuk beraksi secara kolektif terkait CoC.

b. Pelaksanaan latihan maritim gabungan antara AS dan ASEAN yang telah dilaksanakan pada 2 September 2019 dalam rangka memperkuat kerja sama militer dan meningkatkan tingkat kepercayaan AS dengan negara-negara ASEAN. Bagaimanapun juga Tiongkok tidak berkenan atas dilaksanakannya latihan militer gabungan tersebut, sehingga dikhawatirkan semakin memicu peningkatan militerisasi Tiongkok di LCS.

c. Konfrontasi maritim kemungkinan dapat terjadi antara Tiongkok dan negara-negara *claimant* LCS lainnya, terutama dalam hal perebutan wilayah eksplorasi minyak di perairan LCS.

d. Strategi kompetisi Tiongkok-AS pada isu LCS akan mengakibatkan konfrontasi dua kubu, yaitu Jepang, Australia, Inggris, dan Perancis akan berada di kubu AS dan membentuk kelompok anti-Tiongkok. Sedangkan Tiongkok kemungkinan akan mendekat ke Rusia dan mengintensifkan latihan militer gabungan untuk meng-*counter* AS dan aliansinya di LCS.

Aktivitas terkini Negara-Negara *Claimant* LCS

Pada April 2019, Filipina mengadukan Xi Jinping ke *International Criminal Court* (ICC) di Den Haag sebagai upaya menggunakan hukum internasional untuk memeriksa impunitas Tiongkok di LCS (The Guardian, 2019). Rodrigo Duterte mengkritik Tiongkok atas klaim wilayah udara di pulau-pulau buatan di LCS, dan tetap menganggap bahwa wilayah udara di pulau-pulau buatan tersebut adalah wilayah internasional. Kritik Duterte tersebut dilatarbelakangi oleh peringatan tentara Tiongkok untuk mengusir setiap pesawat yang melintasi wilayah udara kepulauan LCS (Perdana, 2019). Pada Februari 2019, Vietnam mengerahkan armada nelayan di garda terdepan di sekitar Laut Natuna Utara untuk menjaga klaimnya atas LCS. Selain itu, Vietnam juga melakukan pembangunan di Pulau Spratly, di antaranya memperpanjang landasan pesawat dari 2.500 kaki menjadi 3.300 kaki (Sevastopulo, 2016).

Status Indonesia dalam Isu LCS

Indonesia tidak termasuk negara *claimant* LCS, namun dapat berperan sebagai pihak ketiga, karena Indonesia merupakan anggota ASEAN di mana mayoritas negara-negara *claimant* LCS adalah negara-

negara ASEAN, serta memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Tiongkok. Namun demikian, Indonesia memiliki perselisihan dengan Tiongkok dan Vietnam terkait Laut Natuna Utara yang diklaim oleh Tiongkok termasuk dalam *nine dashed lines*.

Antara Indonesia dengan Tiongkok, perselisihan ini berakibat pada ditabraknya kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh kapal penjaga pantai Tiongkok di Laut Natuna Utara. Masalah ini kemudian tidak berkepanjangan dan kedua negara berhasil mencari jalan tengah sehingga hubungan bilateral tetap berjalan baik hingga saat ini (Ferguson, 2019).

Sedangkan antara Indonesia-Vietnam, perselisihan ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan terkait Zona Ekonomi Eksklusif kedua negara. Kasus terbaru terjadi pada April 2019, yaitu dua kapal pengawas Vietnam menabrak lambung kapal TNI AL (KRI Tjiptadi-381) di Laut Natuna Utara, ketika kapal TNI AL mencoba menghalau kapal penangkap ikan Vietnam yang mengambil ikan di perairan tersebut (Wijaya, 2019). Pemerintah Indonesia memperkuat kehadiran TNI di Laut Natuna Utara dan berencana untuk menerapkan sistem pertahanan udara *Skyshield* buatan Swiss di Kepulauan Natuna untuk menangkal klaim Tiongkok atas kekayaan cadangan minyak dan gas di perairan Laut Natuna Utara.

Peran Indonesia bersama ASEAN pada Upaya Penyelesaian Isu LCS dan Perkembangan CoC LCS

Dalam upaya menyelesaikan isu LCS, Indonesia bersama ASEAN menginginkan agar ketegangan di LCS dapat segera mereda dan menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat untuk menahan diri agar tidak memperkeruh suasana serta tidak meningkatkan tensi ketegangan di LCS. Dalam sejarahnya, pada 4 November 2002, Indonesia bersama ASEAN dan Tiongkok telah membuat *Declaration of Conduct* (DoC). Deklarasi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah

Indonesia, terutama Menteri Luar Negeri RI bersama Menteri Luar Negeri negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menyepakati *ASEAN's Six Point Principles on the South China Sea* pada 20 Juli 2012 agar tidak terjadi perbedaan sikap dan pendapat.

Kemudian bentuk peran aktif Indonesia dan ASEAN lainnya di LCS adalah dengan menyelenggarakan kegiatan *workshop* setiap tahun yang bertemakan "*Managing Potential Conflicts in the South China Sea*" yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1990. Penyelenggaraan *workshop* tersebut merupakan bagian dari *preventive diplomacy* agar tercipta kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik dan mencegah konflik agar tidak terjadi secara berkelanjutan.

ASEAN dan Tiongkok sudah lebih dari satu dekade membahas mengenai CoC, dan perkembangan terakhir Tiongkok menyatakan ingin menyelesaikan negosiasi CoC dalam waktu tiga tahun. ASEAN menyambut baik niat Tiongkok tersebut dan ingin segera menyelesaikan negosiasi terkait CoC dengan Tiongkok.

Terdapat perkembangan positif terkait perundingan negosiasi *Code of Conduct* (COC) LCS, bahwasanya pada 24 Juli 2019 di Penang, Malaysia pihak ASEAN dan Tiongkok baru saja menyelesaikan putaran pertama pembacaan negosiasi *draft* CoC LCS (Dante, 2019). Hal ini merupakan suatu progres yang baik dan jika CoC sudah disepakati sepenuhnya, maka akan dapat membantu mengatasi situasi dan mengatur tata perilaku di LCS, khususnya bagi negara-negara *claimant*.

Usai putaran pertama pembacaan *draft* CoC LCS selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan negosiasi putaran kedua dan ketiga di tahun-tahun selanjutnya. Salah satu hal yang masih dinegosiasikan adalah sifat dari CoC itu sendiri, apakah akan mengikat secara hukum atau tidak. COC dinilai penting untuk disepakati oleh Tiongkok, ASEAN dan pemangku kepentingan lainnya

di kawasan LCS untuk mendapatkan kesepakatan, kesepakatan dalam membangun kepercayaan di antara negara-negara *claimant*. COC tidak membahas perselisihan teritorial, melainkan kesepakatan mengenai cara mengelola atau mencegah potensi konflik dan krisis di LCS. CoC fokus untuk membangun kepercayaan melalui berbagai kerja sama dan kolaborasi antara ASEAN dan Tiongkok.

Adapun Filipina sempat mengusulkan penyelesaian isu LCS melalui skema ASEAN-X, yang berarti penyelesaian sengketa tersebut hanya dilakukan antara Tiongkok dengan negara-negara ASEAN yang terlibat sebagai *claimant state*. Namun demikian usulan tersebut ditentang oleh Vietnam dan beberapa negara ASEAN lainnya karena tidak sesuai dengan asas komunique bersama ASEAN (Diskusi perwakilan negara-negara ASEAN membahas isu LCS, 2019).

Kesimpulan

Situasi terkini di LCS dapat dilihat dari perkembangan strategi kompetisi dan rivalitas antara Tiongkok dan AS. Masalah LCS tampaknya telah berevolusi dari konfrontasi antara negara-negara *claimant* dan Tiongkok menjadi konfrontasi langsung antara Tiongkok dan AS. Jika persaingan antara Tiongkok dan AS masih berlangsung, tantangan keamanan dan ancaman adalah keprihatinan utama di wilayah ini, sehingga membawa dampak pada sentralitas dan kesatuan ASEAN. Masa depan situasi di LCS mungkin lebih buruk jika ada pihak yang mencoba membawa kekuatan besar lainnya ke dalam masalah ini.

Kekuatan besar di luar kawasan, seperti AS semakin terlibat dan berperan penting untuk mempertahankan stabilitas maritim, dan negara-negara di sekitar perairan LCS juga semakin memperkuat keamanan kedaulatannya sehingga berpotensi memicu konflik regional.

Melihat situasi dan kondisi LCS, Tiongkok tetap mendominasi wilayah perairan LCS (termasuk wilayah udaranya) untuk saat ini dan hingga waktu yang tidak ditentukan dengan terus melakukan pembangunan fasilitas sipil dan militer di setiap pulauanya.

Kapal-kapal perang AS dan sekutunya akan terus melakukan operasi kebebasan bernavigasi di wilayah LCS, sehingga akan semakin meningkatkan ketegangan antara Tiongkok dengan AS dan sekutunya di kawasan. Tindakan dan aktivitas Tiongkok di LCS yang agresif akan semakin memperkecil kemungkinan upaya penyelesaian damai LCS melalui CoC. Terkait dengan perkembangan CoC yang saat ini hanya berupa *draft* yang harus melalui beberapa putaran selama bertahun-tahun, diperkirakan Tiongkok akan cenderung memperlama proses penyelesaian CoC, sehingga jikapun CoC telah selesai maka ketika itu Tiongkok sudah berhasil menguasai sepenuhnya wilayah LCS dan kemungkinan akan menolak segala kesepakatan yang tertuang dalam CoC. Situasi di LCS akan memaksa negara-negara *claimant* dan negara-negara yang memiliki kepentingan di LCS untuk meningkatkan kemampuan militernya, sehingga akan memunculkan perlombaan senjata di kawasan.

Daftar Pustaka

- Aditya, Jun. 2019. *China Tempatkan Jet Tempur di Pulau Sengketa*. Melalui: <https://www.kbknews.id/2019/06/21/china-tempatkan-jet-tempur-di-pulau-sengketa/> [18 Agustus 2019].
- Batongbacal, Jay. 2018. *A Closer Look at China's Proposal for Joint Exploration with the Philippines*. Melalui: <https://amti.csis.org/closer-look-chinas-proposal-joint-exploration-with-philippines/> [1 September 2019].
- Berlianto. *Citra Satelit Tunjukkan China Kerahkan Jet Tempur di Pulau Sengketa*. Melalui: <https://international.sindonews.com/read/1413436/42/citra->

satelit-tunjukkan-china-kerahkan-jet-tempur-di-pulau-sengketa-1561070891 [1 Oktober 2019].

Buzan, Barry dan Hansen, Lene. 2009. *The Evolution of International Security Studies*. New York: Cambridge University Press.

CNN Indonesia. *Tolak Klaim China, Kapal Perang AS Berlayar di LCS*. Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190520144658-113-396499/tolak-klaim-china-kapal-perang-as-berlayar-di-lcs> [5 September 2019].

Creswell, John W. 2007. *Qualitative Inquiry and Research Design*. London: SAGE Publications.

Cronin, Patrick M. dan Kaplan, Robert D. 2012. *Cooperation from Strength: U.S. Strategy and the South China Sea*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).

Dante, Valerle. 2019. *Putaran pertama negosiasi draf COC LCS ASEAN-China rampung*. Melalui: <https://www.alinea.id/dunia/putaran-pertama-negosiasi-draf-coc-lcs-asean-china-rampung-b1Xj59lUb> [2 Oktober 2019].

Dutton, Peter A. 2012. *Cracks in the Global Foundation: International Law and Instability in the South China Sea*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).

DW. 2017. *Cina Minta AS Tidak Ikut Campur Konflik Laut Cina Selatan*. Melalui: <https://www.dw.com/id/cina-minta-as-tidak-ikut-campur-konflik-laut-cina-selatan/a-37252821> [4 Oktober 2019].

Ferguson, Emily. 2019. *Indonesia dan China Dipastikan Bentrok karena Laut China Selatan*. <https://www.matamatapolitik.com/news-china-dan-indonesia-dipastikan-akan-bentrokan-atas-laut-china-selatan/> [6 September 2019].

Fravel, M. Taylor. 2012. *Maritime Security in the South China Sea and the Competition over Maritime Rights*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).

Hardoko, Ervan. 2016. *China Berencana Bangun Armada PLTN Terapung*. Melalui: <https://internasional.kompas.com/read/2016/04/26/0731033>

- 1/China.Berencana.Bangun.Armada.PLTN.Terapung [30
September 2019].
- Hardoko, Ervan. *China Keraahkan Jet Tempur ke Pulau Sengketa*. Melalui:
<https://internasional.kompas.com/read/2016/02/24/18033691/China.Keraahkan.Jet.Tempur.ke.Pulau.Sengketa> [14 Oktober 2019].
- Haryono, Willy. 2019. *Tiongkok Dituduh Tenggelamkan Kapal Nelayan Vietnam*. Melalui:
<https://www.medcom.id/internasional/asia/RkjRdgEk-tiongkok-dituduh-tenggelamkan-kapal-nelayan-vietnam> [12 Agustus 2019].
- Haryono, Willy. *Pengerahan Kapal USS Spruance dan USS Preble ke LCS*. Melalui:
<https://www.medcom.id/internasional/asia/RkjRdgEk-tiongkok-dituduh-tenggelamkan-kapal-nelayan-vietnam> [20 September 2019].
- Holmes, James R. 2012. *Rough Waters for Coalition Building*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
- Jakarta Greater. Tiongkok bersikeras Kuasai 90 % Wilayah Laut China Selatan. Melalui: <https://jakartagreater.com/tiongkok-bersikeras-kuasai-90-wilayah-laut-china-selatan/> [4 Agustus 2019].
- Javad Heydarian, Richard. 2019. *China Rencanakan Bangun 'Kota Pulau' di Laut China Selatan*. Melalui:
<https://www.matamatapolitik.com/news-china-rencanakan-bangun-kota-pulau-di-laut-china-selatan/> [7 Agustus 2019].
- Javad Heydarian, Richard. 2019. *China vs Filipina: Satu Lagi Titik Panas Baru di Laut China Selatan*. Melalui:
<https://www.matamatapolitik.com/in-depth-china-vs-filipina-satu-lagi-titik-panas-baru-di-laut-china-selatan/> [7 Agustus 2019].
- Jinlong, Shen. 2019. *Tiongkok Protes Kebebasan Bernavigasi AS*. Melalui: <http://www.koran-jakarta.com/tiongkok-protes-kebebasan-bernavigasi-as/> [19 Mei 2019].
- Kemenlu Tiongkok. 2016. *Wang Yi: Stick to "Dual-track Approach" When Dealing with the South China Sea Issue*. Melalui:
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1384511.shtml [3 September 2019].

- Lema, Karen. 2019. *Pompeo assures Philippines of U.S. protection in event of sea conflict*. Melalui: <https://www.reuters.com/article/us-philippines-usa/pompeo-assures-philippines-of-us-protection-in-event-of-sea-conflict-idUSKCN1QI3NM> [6 Oktober 2019].
- Miles, Matthew B., Huberman A. Michael. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. *China Kerahkan Rudal DF-26 usai Ancam Tenggelamkan 2 Kapal Induk AS*. Melalui: <https://international.sindonews.com/read/1369539/40/china-kerahkan-rudal-df-26-usai-ancam-tenggelamkan-2-kapal-induk-as-1547143635> [18 September 2019].
- Pedrozo, Raul. 2014. *China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea*. New York: CNA.
- Prijanto, Heru. 2007. *Hukum Laut Internasional*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Priyatno Utomo, Ardi. *Pesawat Pengebom B-52 AS Terbang di Laut China Selatan 2 Kali dalam 10 Hari Terakhir*. Melalui: <https://internasional.kompas.com/read/2019/03/14/18023751/pesawat-pengebom-b-52-as-terbang-di-laut-china-selatan-2-kali-dalam-10> [10 Agustus 2019].
- Rogers, Will. 2012. *The Role of Natural Resources in the South China Sea*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).
- Rohman. *Uji Coba Penembakan Rudal DF-26 Milik Tiongkok*. Melalui: <https://jakartagreater.com/cina-uji-coba-rudal-guam-killer-penghancur-kapal-perang/> [20 Oktober 2019].
- Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Semiawan, Conny R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sevastopulo, Demetri. 2016. *Vietnam mengerahkan armada nelayan di garda terdepan di sekitar Laut Natuna Utara untuk menjaga klaimnya atas LCS*. Melalui: <https://www.ft.com/content/0cd8fc6c-ac86-11e6-9cb3-bb8207902122> [4 Oktober 2019].

Storey, Ian. 2012. *China's Bilateral and Multilateral Diplomacy in the South China Sea*. Pennsylvania: Center for a New American Security (CNAS).

The Guardian. 2019. *South China Sea: Duterte warns Beijing of 'suicide missions' to protect disputed island*. Melalui: <https://www.theguardian.com/world/2019/apr/05/south-china-sea-duterte-warns-china-of-suicide-missions-to-protect-disputed-island> [29 September 2019].

Tippe, Syarifudin., Subagyo, Agus. 2016. *Kapita Selektta Hubungan Internasional*. Bandung: Alfabeta.

Vidya Perdana, Agni. 2019. *Duterte: China Tak Bisa Klaim Wilayah Udara di Atas Pulau Buatan*. Melalui: <https://internasional.kompas.com/read/2018/08/15/05370091/duterte-china-tak-bisa-klaim-wilayah-udara-di-atas-pulau-buatan> [3 Oktober 2019].

VOA Indonesia. 2019. *Armada AS, Filipina, Jepang Gelar Latihan Gabungan di Laut China Selatan*. Melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/armada-as-filipina-jepang-gelar-latihan-gabungan-di-laut-china-selatan/5129087.html> [7 Oktober 2019].

VOA Indonesia. 2019. *AS Jual Drone ke Negara-negara Asia Tenggara untuk Awasi Aktivitas Maritim China*. Melalui: <https://www.voaindonesia.com/a/as-jual-drone-ke-negara-negara-asia-tenggara-untuk-awasi-aktivitas-maritim-china/4953523.html>, [20 Juli 2019].

Wijaya, Callistasia. 2019. *Konflik Indonesia-Vietnam 'terancam terus berulang' selama belum ada kesepakatan Zona Ekonomi Eksklusif*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48103607> [10 Oktober 2019].

Lain-lain

Seminar oleh perwakilan Pemerintah Taiwan di Jakarta tahun 2019.

Diskusi perwakilan negara-negara ASEAN membahas isu LCS di Vietnam tahun 2019.